

**Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Terhadap Kinerja
Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten
Bandung**

¹Syakira Gusmi Manika, ²R. Budi Hendaris

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Achmad Yani

¹syakiragusmi_21p025@ak.unjani.ac.id, ²budi.hendaris@lecture.unjani.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of Transparency, accountability, and participation on the performance of village fund management in villages in Kutawaringin District, Bandung Regency. The number of samples taken in this research was 55 village officials divided into 11 villages in Kutawaringin District, namely Buninagara, Cibodas, Cilame, Gajah Mekar, Jatisari, Jelegong, Kopo, Kutawaringin, Padasuka, Pameuntasan, Sukamulya. This research uses multiple linear regression data analysis methods. The results of the research indicate that partially transparency and accountability do not have a significant effect on the performance of village fund management, while participation has a positive and significant effect on the performance of village fund management. Simultaneously transparency, accountability, participation have a significant effect on village fund management in Kutawaringin District Village, Bandung Regency. The implications of this research indicate that active community participation contributes significantly more to the success of village fund management than simply implementing transparency and accountability. These findings emphasize the importance of a participatory approach at every stage of village fund management, from planning and implementation to evaluation of development programs. Therefore, village governments are advised to prioritize comprehensive community involvement to create more effective, responsive, and sustainable village fund management.

Keywords: *Transparency, Accountability, Participation, Village Fund Management*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pengaruh Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi terhadap kinerja pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung. Jumlah sampel yang diambil pada penelitian ini sebesar 55 aparatur desa yang terbagi atas 11 desa di Kecamatan Kutawaringin, yaitu Buninagara, Cibodas, Cilame, Gajah Mekar, Jatisari, Jelegong, Kopo Kutawaringin, Padasuka, Pameuntasan, Sukamulya. Penelitian ini menggunakan metode analisis data regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial transparansi dan akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa, sedangkan partisipasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa. Secara simultan transparansi, akuntabilitas, partisipasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung. Implikasi dari hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa peran serta masyarakat secara aktif memiliki kontribusi yang lebih signifikan dalam menunjang keberhasilan pengelolaan dana desa dibandingkan dengan sekadar penerapan transparansi dan akuntabilitas. Temuan ini menekankan pentingnya pendekatan partisipasi dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah desa disarankan untuk lebih mengedepankan pelibatan masyarakat secara menyeluruh guna menciptakan pengelolaan dana desa yang lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Pengelolaan Dana Desa

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan di sektor publik, termasuk desa, menjadi salah satu elemen penting dalam membangun sistem pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip *good governance*. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa desa memiliki berbagai sumber pendapatan, antara lain pendapatan asli desa, dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan bahkan sampai pada kebutuhan dalam pengelolaan dana desa.

Dana desa dialokasikan kepada desa-desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program Dana Desa dengan tujuan mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Dana Desa diharapkan dapat menjadi sumber daya utama bagi pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas hidup, dan pengurangan kesenjangan ekonomi di wilayah pedesaan. Namun, keberhasilan pengelolaan Dana Desa sangat bergantung pada penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat di setiap tahapan prosesnya.

Transparansi merupakan sikap terbuka pemerintah dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah, sehingga proses tersebut dapat diakses dan diawasi oleh DPRD serta masyarakat. dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa informasi yang terkait dengan anggaran publik, termasuk dana desa, harus transparan dan dapat diakses oleh masyarakat. Keterbukaan informasi ini sangat penting untuk membangun kepercayaan publik, mendorong partisipasi aktif, serta meminimalisir potensi penyalahgunaan dana. Tanpa adanya transparansi yang baik, masyarakat akan kesulitan mengakses informasi tentang bagaimana dana tersebut dikelola, yang dapat memicu terjadinya spekulasi, ketidakpercayaan, dan bahkan dugaan korupsi.

Di samping transparansi, akuntabilitas juga merupakan faktor krusial dalam pengelolaan Dana Desa. Akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab kinerja aparat pemerintah desa, yang mencakup seluruh tahapan dimulai dari tahap perencanaan hingga proses pengawasan kegiatan yang melibatkan penggunaan anggaran. Setiap pelaksanaan kegiatan harus dilaporkan secara sistematis dan akuntabel kepada masyarakat dan pemerintah di tingkat yang lebih tinggi, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Garung and Ga, 2020). Dengan adanya akuntabilitas yang baik, pemerintah desa berkewajiban untuk memastikan bahwa dana yang diterima dikelola dengan baik, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, dan diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

Selain itu, partisipasi masyarakat juga memiliki peran penting dalam pengelolaan Dana Desa. Partisipasi tersebut meliputi keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program yang dijalankan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam seluruh proses pengelolaan dana desa. Melalui partisipasi yang aktif, masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya, memantau jalannya kegiatan, serta memberikan saran yang positif dan bermanfaat dalam pengelolaan dana desa. Partisipasi yang tinggi dari masyarakat diharapkan dapat mendorong pemerintah desa untuk lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan mencegah terjadinya penyelewengan dana, karena masyarakat terlibat langsung dalam proses pengawasannya.

Dalam penelitiannya, Bastian (2019) Kinerja pengelolaan keuangan mencerminkan kebijakan anggaran yang disusun berdasarkan skala prioritas dan platform anggaran serta dilakukan pengalokasian anggaran melalui penatausahaan, akuntansi, dalam berbagai pelaporan pelaksanaan sesuai dengan evaluasi kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Kinerja ini tidak hanya diukur dari *output* pembangunan fisik yang dihasilkan, tetapi juga dari seberapa besar dampaknya terhadap peningkatan kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat desa. Di sinilah peran transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi sangat menentukan, karena ketiga faktor tersebut saling berhubungan dalam menciptakan tata kelola yang baik (*good governance*) di tingkat desa.

Meskipun regulasi mengenai pengelolaan Dana Desa telah diatur dengan cukup rinci, pada kenyataannya, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Tidak sedikit desa yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara menyeluruh dalam pengelolaan dana desa, dan partisipasi masyarakat masih tergolong rendah. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan dana desa belum mencapai tingkat kinerja yang maksimal, sehingga berbagai tujuan pembangunan desa tidak dapat direalisasikan sepenuhnya.

Pada tahun 2024, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat jumlah korupsi di Tingkat desa paling besar di sepanjang tahun 2023, selama tahun 2023 terdapat 187 kasus korupsi di desa. Menurut ICW, peningkatan korupsi di desa tidak terlepas dari disakanya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memuat alokasi dana desa, Maka pada tahun 2023, pemerintah mengeluarkan anggaran sebesar Rp 68 Triliun untuk 75.265 desa di seluruh Indonesia yang artinya, rata-rata satu desa dapat mengelola dana desa sebesar Rp 903 juta. Kendati anggaran ini ditujukan untuk pemerataan kesejahteraan, tetapi tanpa prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas, dana desa dikhawatirkan menjadi ladang basah korupsi, (ICW 2024)

Mengingat banyaknya kasus yang melibatkan dana desa, peran aktif pemerintah pusat dalam pengawasan sangat dibutuhkan. Hal ini dapat dicapai dengan mendorong transparansi dan akuntabilitas aparat desa, serta memperkuat partisipasi masyarakat melalui pendampingan dan memperkuat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwakilan dalam menyampaikan aspirasi terkait pengawasan pengelolaan dana desa dan dana lainnya yang dikelola oleh

pemerintah desa. Berikut ini data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung:

Tabel 1, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

	Nama Desa	Anggaran Dana Desa	Realisasi Dana Desa	Selisih Anggaran
1	Buninagara	1.328.599.000	1.320.292.000	- 8.307.000
2	Gajah Mekar	1.109.750.000	1.106.000.000	- 3.750.000
3	Jelegong	1.632.793.000	1.624.375.000	- 8.418.000
4	Kutawaringin	1.024.379.000	1.022.355.000	- 2.024.000
5	Pameuntasan	1.044.122.000	1.039.100.000	- 5.022.000
	Total	6.139.643.000	6.112.122.000	- 27.521.000

Sumber: Pemerintah Kecamatan Kutawaringin (Data Diolah), 2025

Berdasarkan tabel anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di atas, terlihat bahwa pendapatan APBDes di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung pada tahun 2023, anggaran dana desa pada 5 desa di Kecamatan Kutawaringin yaitu sebesar Rp.6.139.643.000 tetapi Realisasi Dana Desa hanya sebesar Rp.6.112.122.000 dan memiliki selisih anggaran Rp.-27.521.000 dari selisih anggaran tersebut mengindikasikan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa pada Desa di wilayah Kecamatan Kutawaringin tersebut masih belum sepenuhnya berjalan secara efektif, dari total 11 desa terdapat 5 desa yang memiliki selisih anggaran.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa disebutkan bahwa, Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya. Kementerian Keuangan RI menyatakan bahwa, “Bagi Desa yang mempunyai sisa Dana Desa tahun sebelumnya di RKD lebih dari 30%, Bupati/Walikota dapat menunda penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya. Apabila sampai bulan Agustus tahun anggaran berjalan, Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda tersebut tidak dapat disalurkan dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD. Sisa dana dimaksud tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.”

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi terhadap kinerja pengelolaan Dana Desa. Dengan memahami bagaimana ketiga variabel ini dapat memberikan dampak positif terhadap efektivitas pengelola dana desa, serta diharapkan mampu menghasilkan solusi yang lebih tepat dalam upaya peningkatan mutu tata kelola keuangan di tingkat desa dan memperkuat peran masyarakat dalam mengawasi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa.

TINJAUAN LITERATUR

Konsep Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah dengan batas-batas yang telah ditetapkan dan diakui secara resmi oleh pemerintah, serta memiliki kewenangan untuk mengelola dan menyelenggarakan urusan masyarakat lokal berdasarkan sejarah, tradisi, dan nilai-nilai yang hidup dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Desa diakui secara hukum sebagai bagian dari struktur pemerintahan Indonesia dan memiliki otonomi untuk menjalankan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Menurut, Permendagri (2018), Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Transparansi

Peraturan Pemerintah RI No 24 (2005) Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan bahwa transparansi yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat dengan adanya pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dimandatkan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparansi merupakan kebebasan untuk memperoleh informasi publik secara langsung oleh mereka yang membutuhkan. (Mardiasmo, 2018: 23) dikutip dalam (Putri and Maryono, 2022).

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah tanggung jawab untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan hasil kerja atau tindakan kepada pihak yang berwenang. Akuntabilitas dapat diterapkan pada individu, organisasi, atau pemerintahan. Menurut United Nation Development Programme (UNDP) Akuntabilitas mengacu pada kewajiban untuk membuktikan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan standar yang disepakati, dan untuk melaporkan hasil kinerja secara objektif dan akurat sesuai dengan peran dan/atau rencana yang diamanatkan. Dalam, Hendaris and Romli (2021) Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan perwujudan tanggung jawab kepala desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa kepada para pemangku kepentingan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berkala. Menurut, Mardiasmo (2018: 40) dikutip dalam Putri and Maryono (2022) Akuntabilitas pemerintahan dikatakan baik apabila memenuhi beberapa kriteria yaitu: (1) setiap keputusan, baik yang diambil secara individu maupun kolektif, dapat dipertanggungjawabkan; (2) setiap keputusan harus dilaporkan dan dijelaskan secara transparan, disertai dengan penerapan sanksi yang akan dikenakan jika tidak

dilaksanakan dengan baik; dan (3) terdapat langkah-langkah efektif untuk mencegah serta mengoreksi penyimpangan administrasi serta tindakan pemerintah yang melanggar sipil. Akuntabilitas publik terbagi menjadi dua jenis, yaitu akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*).

Partisipasi

Menurut, Nabilla and Desitama (2023) Secara umum, partisipasi masyarakat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, keterlibatan dalam pelaksanaan pembangunan, serta dalam penggunaan hasil dari pembangunan tersebut. Menurut, Sholekan (2014) dikutip dalam Nabilla and Desitama (2023) Partisipasi masyarakat mencakup semua aspek interaksi antara masyarakat dan pemerintah. Indikator partisipasi masyarakat meliputi:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait proses penentuan berbagai pilihan bersama masyarakat untuk mencapai kesepakatan tentang gagasan yang berkaitan dengan kepentingan bersama.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan, yang merupakan tahap selanjutnya dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, dan tujuan.
3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat, yang menunjukkan sejauh mana rencana yang diimplementasikan berhasil dan memenuhi target yang ditetapkan.

Kinerja Pengelolaan Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Sebagaimana yang disebutkan Bastian M (2019, p. 96) dalam Suryani and Hidayat (2023) Kinerja Pengelolaan Keuangan mencerminkan bagaimana kebijakan pemanfaatan anggaran didasarkan pada usulan alokasi dana sesuai prioritas dan platform anggaran atas program dan kegiatan. Kebijakan ini menjadi dasar alokasi anggaran, yang dilaksanakan melalui administrasi dan akuntansi, serta berbagai proses pelaporan yang konsisten dengan evaluasi kinerja dan akuntabel.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner dengan menggunakan Google Form. Adapun populasi pada penelitian ini adalah 11 Desa yang terletak di wilayah Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dengan jumlah populasi sebanyak 55 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode *purposive sampling* yang mana penentuan sampel berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu.

Analisis deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menginterpretasikan data guna menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum tanpa ada tujuan lain. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya, analisis koefisien korelasi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan linear antara dua variabel, sedangkan analisis koefisien determinasi bertujuan untuk menentukan sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara simultan maupun secara individual, dilakukan (1) Uji Kelayakan Model (Uji F) dan (2) Uji Kelayakan Model (Uji T).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas Dan Uji Reliabilitas

Uji Validitas

Tabel 2. Hasil Uji Validasi Variabel Transparansi

Variabel	Indikator	No Item	r hitung	r tabel	Ket
Variabel Independen (X1) Transparansi	Informatif	1	0,556	0,266	Valid
		2	0,571	0,266	Valid
		3	0,685	0,266	Valid
	Keterbukaan	1	0,571	0,266	Valid
		2	0,315	0,266	Valid
		3	0,561	0,266	Valid
	Pengungkapan	1	0,597	0,266	Valid
		2	0,628	0,266	Valid
		3	0,489	0,266	Valid

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS, 2025

Berdasarkan hasil uji validitas variabel transparansi, dapat disimpulkan bahwa pada variabel transparansi untuk semua item pernyataan di atas dinyatakan valid karena menunjukkan hasil $r_{hitung} \geq$ dari r_{tabel} (0,266).

Tabel 3. Hasil Uji Validasi Variabel Akuntabilitas

Variabel	Indikator	No Item	r hitung	r tabel	Ket
Variabel Independen (X2) Akuntabilitas	Kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan	1	0,711	0,266	Valid
		2	0,647	0,266	Valid
		3	0,700	0,266	Valid
	Adanya sanksi atas kesalahan atau kelalaian	1	0,562	0,266	Valid
		2	0,698	0,266	Valid

dalam pelaksanaan kegiatan	3	0,506	0,266	Valid
Adanya <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang terstruktur	1	0,647	0,266	Valid
	2	0,554	0,266	Valid
	3	0,654	0,266	Valid

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS, 2025

Berdasarkan hasil uji validasi variabel akuntabilitas, dapat disimpulkan pada variabel akuntabilitas untuk semua item pernyataan di atas dinyatakan valid karena menunjukkan hasil $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ (0,266).

Tabel 4. Hasil Uji Validasi Variabel Partisipasi

Variabel	Indikator	No Item	r hitung	r tabel	Ket
Variabel Independen (X3) Partisipasi	Partisipasi dalam pengambilan Keputusan	1	0,569	0,266	Valid
		2	0,734	0,266	Valid
		3	0,655	0,266	Valid
	Partisipasi dalam pelaksanaan	1	0,560	0,266	Valid
		2	0,678	0,266	Valid
		3	0,778	0,266	Valid
	Partisipasi dalam pengambilan manfaat	1	0,630	0,266	Valid
		2	0,609	0,266	Valid
		3	0,523	0,266	Valid

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS, 2025

Berdasarkan hasil uji validasi variabel partisipasi, dapat disimpulkan pada variabel partisipasi untuk semua item pernyataan di atas dinyatakan valid karena menunjukkan hasil $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ (0,266).

Tabel 5. Hasil Uji Validasi Variabel Kinerja Pengelolaan Dana Desa

Variabel	Indikator	No Item	r hitung	r tabel	Ket
Variabel Dependen (Y) Kinerja Pengelolaan Dana Desa	Efisiensi	1	0,664	0,266	Valid
		2	0,621	0,266	Valid
		3	0,580	0,266	Valid
	Efektivitas	1	0,655	0,266	Valid
		2	0,649	0,266	Valid
		3	0,668	0,266	Valid
	Ekonomis	1	0,512	0,266	Valid
		2	0,724	0,266	Valid
		3	0,601	0,266	Valid

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS, 2025

Berdasarkan hasil uji validasi variabel kinerja pengelolaan dana desa, dapat disimpulkan pada variabel kinerja pengelolaan dana desa untuk semua item

pernyataan di atas dinyatakan valid karena menunjukkan hasil $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ (0,266). Dengan demikian, semua pernyataan yang tercantum dalam kuesioner ini valid, sehingga penelitian dapat dilanjutkan.

Uji Reliabilitas

Setelah kuesioner dinyatakan valid, langkah selanjutnya dalam penelitian ini adalah memastikan bahwa kuesioner dapat digunakan dalam realistik melalui pengujian reliabilitas. Untuk mengetahui reliabel atau tidaknya penelitian dapat digunakan pendekatan statistik melalui perhitungan koefisien reliabilitas. Apabila nilai koefisien reliabilitas melebihi angka 0,6 maka instrumen dinyatakan reliabel secara keseluruhan. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode *Cronbach's Alpha*, maka hasil uji reliabilitas dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Transparansi

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.715	9

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS, 2025

Berdasarkan hasil uji reliabilitas variabel transparansi, menunjukkan bahwa hasil reliabilitas dari variabel Transparansi (X1) mendapat hasil tingkat reliabilitas sebesar 0,715 dengan demikian instrumen yang digunakan dalam penelitian ini reliabel sebesar 71,5%.

Adapun hasil pengujian terhadap variabel Akuntabilitas disajikan sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Akuntabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.811	9

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS, 2025

Berdasarkan hasil uji reliabilitas variabel akuntabilitas, menunjukkan bahwa hasil reliabilitas dari variabel Akuntabilitas (X2) mendapatkan hasil tingkat reliabilitas sebesar 0,811 dengan demikian instrumen yang digunakan pada penelitian ini reliabel sebesar 81,1%.

Adapun hasil pengujian terhadap variabel Partisipasi disajikan sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Partisipasi

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.818	9

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS, 2025

Berdasarkan hasil uji reliabilitas variabel partisipasi, menunjukkan bahwa hasil reliabilitas dari variabel Partisipasi (X3) mendapatkan hasil tingkat reliabilitas sebesar 0,818 dengan demikian instrumen yang digunakan pada penelitian ini reliabel sebesar 81,8%.

Adapun hasil pengujian terhadap variabel kinerja pengelolaan dana desa disajikan sebagai berikut:

Tabel 9. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kinerja Pengelolaan Dana Desa

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.810	9

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS, 2025

Berdasarkan hasil uji reliabilitas variabel kinerja pengelolaan dana desa, menunjukkan bahwa hasil reliabilitas dari variabel Kinerja Pengelolaan Dana Desa (Y) mendapatkan hasil tingkat reliabilitas sebesar 0,810 dengan demikian instrumen yang digunakan pada penelitian ini reliabel sebesar 81%.

Karena seluruh variabel dalam pengujian menunjukkan nilai reliabilitas di atas 0,6, maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan tergolong andal (reliabel). Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh data yang telah dikumpulkan layak untuk digunakan dalam tahap analisis selanjutnya.

Hasil Uji Normalitas Data

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan *Kolmogorov-smirnov* Berikut ini hasil uji normalitas data tersebut :

Tabel 10. Hasil Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Unstandardized Residual	
N		55	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	3319.093348	
Most Extreme Differences	Absolute	.114	
	Positive	.112	
	Negative	-.114	
Test Statistic		.114	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.073	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	.073	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.066
		Upper Bound	.079
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.			

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS, 2025

Merujuk pada hasil uji normalitas data, nilai signifikansi yang diperoleh dari uji Kolmogorov-Smirnov dalam penelitian ini adalah 0,073. Nilai ini melebihi ambang batas 0,05, sehingga disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 11. Hasil Uji Multikolinearitas

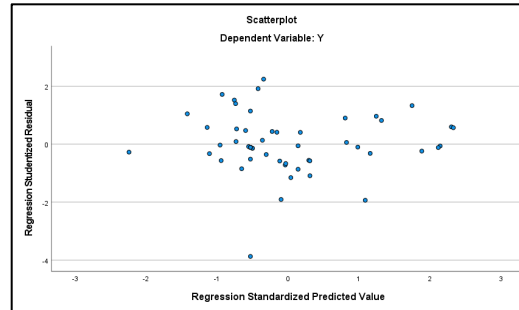
Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	.415	2.411
	X2	.303	3.301
	X3	.490	2.041
a. Dependent Variable: Y			

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS, 2025

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, nilai toleransi untuk variabel Transparansi (X1) adalah 0,415, variabel Akuntabilitas (X2) adalah 0,303, dan variabel Partisipasi adalah 0,490. Ketiga nilai ini lebih besar dari 0,10, yang menunjukkan bahwa variabel independen terbebas dari gejala Multikolinearitas. Selanjutnya, nilai *variance inflation factor* (FIV) dari variabel Transparansi (X1) sebesar 2,411, variabel Akuntabilitas (X2) sebesar 3,301, dan variabel Partisipasi (X3) sebesar 2,041 bisa disimpulkan nilai dari ke tiga variabel tersebut kurang dari 10. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua variabel yang diuji memiliki nilai VIF yang kurang dari 10 sehingga hal ini membuktikan bahwa variabel yang diuji terbebas dari gejala Multikolinearitas. Maka dari itu syarat kedua regresi berganda telah terpenuhi.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 12. Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber: Hasil pengolahan data SPSS, 2025

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas, grafik *scatterplot*, menunjukkan bahwa titik-titik data terdistribusi secara acak tanpa membentuk pola tertentu yang sistematis. Serta titik-titik tersebut tersebar merata di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak ditemukan gejala heterokedastisitas pada model regresi.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 13. Hasil Uji Regresi linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3330.647	3004.517		1.109	.273
	X1	.074	.164	.065	.451	.654
	X2	.275	.167	.278	1.646	.106
	X3	.476	.132	.477	3.599	<.001

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS, 2025

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda, dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah

$$Y = 3330,647 + 0,074 X_1 + 0,275 X_2 + 0,476 X_3 + \epsilon$$

Nilai konstanta sebesar 3330,647 menunjukkan bahwa ketika Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), Partisipasi (X3) bernilai 0 maka kinerja pengelolaan dana desa (Y) bernilai 3330.647. Nilai koefisien regresi Transparansi (X1) bernilai positif sebesar 0,074, berarti bahwa setiap terjadi peningkatan Transparansi (X1) maka variabel kinerja pengelolaan dana desa (Y) meningkat, begitu pun sebaliknya dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya adalah tetap. Nilai koefisien regresi Akuntabilitas (X2) dengan nilai sebesar 0,275, berarti bahwa setiap terjadi peningkatan Akuntabilitas (X2) maka variabel kinerja pengelolaan dana desa (Y) meningkat, begitu pun sebaliknya dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya adalah tetap. Nilai koefisien regresi Partisipasi (X3) dengan nilai sebesar 0,476, berarti bahwa setiap terjadi peningkatan Partisipasi (X3) maka variabel kinerja

pengelolaan dana desa (Y) meningkat, begitu pun sebaliknya dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya adalah tetap.

Hasil Analisis Koefisien Korelasi

Tabel 14. Hasil Uji Koefisien Korelasi

		Correlations			
		X1	X2	X3	Y
X1	Pearson Correlation	1	.764**	.572**	.550**
	Sig. (2-tailed)		<,001	<,001	<,001
	N	55	55	55	55
X2	Pearson Correlation	.764**	1	.713**	.667**
	Sig. (2-tailed)	<,001		<,001	<,001
	N	55	55	55	55
X3	Pearson Correlation	.572**	.713**	1	.712**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001		<,001
	N	55	55	55	55
Y	Pearson Correlation	.550**	.667**	.712**	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	
	N	55	55	55	55

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS, 2025

Berdasarkan hasil Uji Koefisien Korelasi yang disajikan, interpretasi uji korelasi parsial antara transparansi dengan kinerja pengelolaan dana desa menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,550 yang menunjukkan adanya hubungan antara kedua variabel. Nilai koefisien yang positif menunjukkan bahwa setiap peningkatan transparansi akan diikuti oleh peningkatan kinerja pengelolaan dana desa. Selanjutnya, interpretasi uji korelasi parsial antara akuntabilitas dengan kinerja pengelolaan dana desa menunjukkan nilai sebesar 0,667 yang menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki hubungan yang kuat. Nilai koefisien korelasi yang positif menunjukkan bahwa peningkatan akuntabilitas akan diiringi dengan peningkatan kinerja pengelolaan dana desa. Terakhir, interpretasi uji korelasi parsial menunjukkan nilai sebesar 0,712 antara partisipasi dengan kinerja pengelolaan dana desa yang menunjukkan hubungan yang kuat. Nilai koefisien korelasi yang positif ini menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi akan diiringi dengan peningkatan kinerja pengelolaan dana desa.

Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Tabel 15. Hasil Uji Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.128 ^a	.016	-.042	2441.87647

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS, 2025

Kd	= R² x 100%
	= (0,128)² x 100%
	= 16,3%

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, koefisien determinasi atau R Square yang diperoleh sebesar 16,3%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi terhadap kinerja pengelolaan dana desa dalam penelitian ini adalah sebesar 16,3%, sedangkan sisanya sebesar 83,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Tabel 16. Hasil Uji T-Statistik

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3330.647	3004.517		1.109	.273
	X1	.074	.164	.065	.451	.654
	X2	.275	.167	.278	1.646	.106
	X3	.476	.132	.477	3.599	<.001

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS, 2025

Pengujian variabel Transparansi (X1) diatas terlihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 0,451 dan nilai t_{tabel} sebesar 2,00758. Maka, $0,451 < 2,00758$ atau $t_{hitung} < t_{tabel}$, dengan nilai signifikansi sebesar $0,654 > 0,05$ yang artinya H_0 dinyatakan diterima dan H_a dinyatakan ditolak yang artinya tidak terdapatnya pengaruh antara Transparansi (X1) terhadap kinerja pengelolaan dana desa (Y). Pengujian variabel Akuntabilitas (X2) di atas terlihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 1,646 dan nilai t_{tabel} sebesar 2,00758. Maka $1,646 < 2,00758$ atau $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan signifikan adalah $0,106 > 0,05$ maka dapat disimpulkan H_0 dinyatakan diterima dan H_a dinyatakan ditolak yang artinya tidak terdapatnya pengaruh antara Akuntabilitas (X2) terhadap kinerja pengelolaan dana desa (Y). Pengujian variabel Partisipasi (X3) di atas terlihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 3,599 dan nilai t_{tabel} sebesar 2,00758. Maka $3,599 > 2,00758$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan signifikan adalah $0,001 < 0,05$ maka H_a dinyatakan diterima dan H_0 dinyatakan ditolak yang artinya terdapat pengaruh antara Partisipasi (X3) terhadap kinerja pengelolaan dana desa (Y).

Hasil Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji f)

Berdasarkan pengolahan data menggunakan IBM SPSS maka diperoleh hasil Uji F-Statistik adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Hasil Uji F-Statistik

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	759426676.2	3	253142225.4	21.702	<.001 ^b
	Residual	594884555.3	51	11664403.05		
	Total	1354311232	54			

a. Dependent Variable: Y
 b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS, 2025

Berdasarkan hasil Uji F-Statistik, dapat dilihat bahwa F_{hitung} seluruh variabel independen (bebas) adalah sebesar 21,702, maka $21,702 > 2,79$ atau $F_{hitung} > f_{tabel}$ dan nilai signifikan $0,001 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Yang artinya Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi secara bersamaan (simultan) berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa.

Dengan demikian, pada penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan dana desa memiliki peran penting, mengingat dana desa berfungsi secara strategis dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta upaya pengentasan kemiskinan di tingkat desa. Apabila dana desa dikelola dengan baik, maka manfaatnya akan langsung dirasakan oleh masyarakat desa, baik dalam bentuk peningkatan layanan dasar, pertumbuhan ekonomi lokal, maupun pemberdayaan masyarakat. Selain itu, kinerja pengelolaan dana desa mencerminkan tingkat profesionalitas dan integritas pemerintah desa dalam menjalankan fungsi-fungsi administrasi keuangan. Pengelolaan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa serta turut mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh, Nabilla dan Desitama (2023) yang menyimpulkan bahwa secara simultan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian ini, berdasarkan hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa transparansi tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung dan telah dibuktikan melalui hasil uji t parsial yang menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Desa-desa di Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, sudah memberikan Transparansi dalam penyampaian informasi secara fisik/digital, Musyawarah desa, pelaporan dan pertanggungjawaban publik, keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan *banner* desa, namun tidak memberikan dampak yang lebih besar terhadap kinerja pengelolaan dana desa. Hal ini dapat disebabkan tingkat oleh transparansi bersifat formalitas dan tingkat literasi masyarakat yang rendah, oleh karena itu faktor-faktor lain seperti dukungan teknologi informasi, komitmen dan integritas pemerintahan

desa, kapasitas sumber daya manusia (SMD). Oleh karena itu sangat penting untuk meneliti elemen-elemen lain yang dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan dana desa.

Penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh, Putri dan Maryono (2022) yang menunjukkan bahwa secara parsial, Transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Selain itu, Maina et al., (2022) menyatakan bahwa Transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Hasil penelitian, Ginting et al., (2024) mengungkapkan bahwa Transparansi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian ini, perhitungan statistik menunjukkan bahwa Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten, Bandung. Temuan ini telah dibuktikan melalui hasil uji t parsial, yang menunjukkan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun akuntabilitas telah diterapkan dalam pengelolaan dana desa di desa-desa di Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, melalui mekanisme pelaporan, akuntabilitas, dan transparansi administrasi, hal tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kinerja pengelolaan dana desa. Kemungkinan besar, faktor-faktor lain, seperti partisipasi masyarakat, kapasitas aparatur desa, efektivitas pengawasan, serta kualitas perencanaan dan pelaksanaan program, memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kinerja tersebut. Oleh karena itu, sangat penting untuk meneliti elemen-elemen lain yang berpotensi memengaruhi kinerja pengelolaan dana desa secara lebih mendalam dan menyeluruh.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh, Putri et al., (2021) hasil penelitian menunjukan bahwa variabel akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan Masyarakat. Yanto and Aqfir (2020) dalam pengujiannya menyatakan bahwa pengujian secara parsial, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa.

Pengaruh Partisipasi terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Temuan ini diperkuat dengan uji t parsial yang menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,05.

Oleh karena itu, partisipasi memegang peran krusial dalam pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa yang efektif, efisien, dan tepat sasaran tidak dapat tercapai tanpa keterlibatan aktif masyarakat, yang berperan sebagai subjek sekaligus objek dalam proses pembangunan. Partisipasi juga berfungsi sebagai kontrol sosial yang mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa, ketika masyarakat turut memantau pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana, maka potensi penyimpangan dapat diminimalkan, selain itu, partisipasi memperkuat rasa memiliki terhadap program pembangunan, yang berdampak pada meningkatnya keberlanjutan dan kualitas hasil program tersebut.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nabilla dan Desitama (2023) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat secara parsial berpengaruh terhadap pengelolaan. Putri et al., (2021) menemukan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Hasil penelitian, Nurfitri dan Ratnawati (2023) juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa

Hipotesis penelitian menyatakan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi secara simultan memengaruhi kinerja pengelolaan dana desa di Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Hal ini telah berhasil dibuktikan melalui analisis statistik menggunakan uji F (simultan), dengan membandingkan nilai f_{hitung} dengan nilai f_{tabel} terdistribusi, dan dengan menentukan tingkat signifikansi masing-masing uji berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh, Nabilla dan Desitama (2023) hasil penelitian menyatakan bahwa secara simultan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Menurut, Putri dan Maryono (2022) Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kompetensi aparat desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Maju (2021) Dalam penelitiannya, dijelaskan bahwa hasil uji F secara simultan menunjukkan bahwa secara bersama-sama, variabel akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap proses pembangunan desa.

Dengan demikian, pada penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan dana desa memiliki peran penting dikarenakan dana desa memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta pengentasan kemiskinan di tingkat desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pengujian hipotesis yang dilakukan mengenai pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini bahwa Transparansi dan Akuntabilitas secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung. Sementara itu, Partisipasi berpengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung. Namun, secara simultan Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam dua aspek utama. Dari sisi teoritis, hasil temuan ini menambah referensi akademik di bidang akuntansi sektor

publik dan tata kelola keuangan desa, khususnya dalam memahami bagaimana elemen-elemen tata kelola memengaruhi kinerja pengelolaan dana desa. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa dan pihak terkait agar lebih memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dana desa, tanpa mengesampingkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai elemen pendukung.

Meski demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam penelitian dengan menggunakan kuesioner yaitu terkadang jawaban yang diberikan oleh responden tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah desa, serta pemangku kepentingan lainnya dalam merancang strategi kebijakan yang mendorong terciptanya tata kelola yang inklusif, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Saran

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan kembali faktor-faktor tambahan yang dapat mempengaruhi Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, dan Kinerja Pengelolaan Dana Desa. Jika penelitian serupa dilakukan, disarankan untuk memilih faktor-faktor yang berbeda dari Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi guna untuk membandingkan hubungan antara variabel independen dan Kinerja Pengelolaan Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, M. (2019). *Organizational financial management theory: Text and case*. Addition Wesley Publishing Company, A & M University.
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam pencapaian good governance pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>
- Ginting, M. C., Simanjuntak, A., Siahaan, S. B., Elisabeth, D. M., & Ginting, J. E. S. (2024). The influence of transparency, accountability, community participation on village fund management in realizing good governance in mountain villages in Tigabinanga District, Karo District. *Jurnal Ilmiah Accusi*, 6(1), 20–29. <https://doi.org/10.36985/2gpmq412>
- Hendaris, B., & Romli, R. (2021). Effect of village apparatus performance, internal control, information technology utilization on village fund accountability and implications on quality village financial report. *Dinasti International Journal of Management*, 2(4), 569–580.
- Maina, N., Subarkah, J., & Pravasanti, Y. A. (2022). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa se-Kecamatan Sambu Boyolali. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 1(2), 51–59. <https://doi.org/10.53088/jikab.v1i2.8>

- Maju, S. (2021). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa (Studi kasus di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat). *Jurnal Ilmiah Kohesi*, 4(2), 3–15.
- Nabilla, S. D., & Desitama, F. S. (2023). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Kaligrejeng Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 7(1), 1347–1359. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.6260>
- Nurfitri, A. B., & Ratnawati, D. (2023). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa. *Jesya*, 6(2), 1794–1805. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1181>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. LN. 2005 No. 49, TLN No. 4503.
- Permendagri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Putri, A. A. A., Sudiana, I. W., & Putra, I. P. D. S. (2021). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa pada Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 2(2), 258–280. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i2.1543>
- Putri, A., & Maryono. (2022). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kompetensi aparat desa terhadap pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 4(3).
- Suryani, M. K., & Hidayat, M. T. (2023). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kompetensi aparat terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa dengan moderasi sistem pengendalian internal pada desa di Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(1), 228–247.
- Yanto, E., & Aqfir. (2020). Pengaruh transparansi, partisipasi dan akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa. *Ekonomy Deposit Jurnal*, 2(2), 62–76.